

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional telah lama menjadi tulang punggung perekonomian global dan Indonesia tidak terkecuali dalam hal ini. Sebelum era pemerintahan Presiden Joko Widodo, perdagangan internasional Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga komoditas, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Misalnya, harga minyak sawit dan batu bara, yang merupakan dua komoditas ekspor utama Indonesia, sering kali mengalami instabilitas di pasar internasional.

Pada tahun 2013, harga minyak sawit mentah turun hingga 35% dari puncaknya pada tahun 2011, sedangkan harga batu bara turun sekitar 20% pada periode yang sama.¹ Ketergantungan Indonesia pada ekspor sumber daya alam juga menjadi masalah yang krusial. Pada tahun 2010, sekitar 60% dari total ekspor Indonesia berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan.² Hal ini membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Selain itu, hambatan tarif dan nontarif, seperti bea masuk yang tinggi dan regulasi yang

¹ KESDM RI, "ICP Maret 2013 Turun Jadi US\$ 107,42 per Barel," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, April 2, 2013, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/icp-maret-2013-turun-jadi-us-10742-per-barel>.

² BPS, "Ekspor Indonesia Oktober 2010 Meningkatkan 16,72% Sedang Impor Oktober 2010 Meningkatkan 25,81%," 2010, <https://www.bps.go.id/id/api/pressrelease/2010/12/01/874/ekspor-indonesia-oktober-2010-meningkat-16-72--persen-sedang-impor-oktober-2010-meningkat-25-81--persen.html>.

ketat, memperburuk situasi. Sebagai contoh, tarif bea masuk untuk produk elektronik yang cukup tinggi membatasi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan keanekaragaman produk, keterbatasan infrastruktur menjadi penghalang signifikan. Infrastruktur transportasi yang belum memadai, seperti pelabuhan yang kurang efisien dan jaringan jalan yang terbatas, meningkatkan biaya logistik dan waktu pengiriman. Pada tahun 2013, World Bank melaporkan bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB),³ jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Selain itu, birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih sering kali menghambat upaya ekspansi perdagangan internasional. Prosedur ekspor-impor yang kompleks dan berbelarut-larut mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Misalnya, untuk mendapatkan izin ekspor, pelaku usaha harus melalui berbagai tahapan yang memakan waktu dan biaya, yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Melihat berbagai tantangan ini, sangat jelas bahwa sebelum era pemerintahan Joko Widodo, perdagangan internasional Indonesia membutuhkan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini menuntut adanya reformasi struktural yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah perdagangan internasional.

³ World Bank, "High Logistics Costs Impede Higher Economic Growth For Indonesia, Says Joint Report," World Bank Group, 2013, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/09/06/high-logistics-costs-impede-higher-economic-growth-for-indonesia>.

Menyadari berbagai tantangan yang dihadapi perdagangan internasional sebelum era kepemimpinannya, Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengubah lanskap perdagangan Indonesia. Sejak menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014, Joko Widodo telah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing perdagangan internasional Indonesia.⁴ Salah satu upaya signifikan adalah program pembangunan infrastruktur besar-besaran yang mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Hingga tahun 2019, pemerintah berhasil membangun lebih dari 1.500 kilometer jalan tol, 15 bandara baru, dan memperbaiki lebih dari 20 pelabuhan di seluruh Indonesia.⁵ Sebagai contoh, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang dirancang untuk menjadi hub internasional telah meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi waktu tunggu kapal hingga 30%.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor-impor untuk memudahkan pelaku usaha. Pada tahun 2017, Indonesia meluncurkan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) yang memungkinkan proses ekspor-impor dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.⁶ Sistem ini berhasil mengurangi waktu pengurusan dokumen dari rata-rata 6,5 hari

⁴ Arie Firdaus, "Analysts: Expanded Coalition Creates Challenge for Indonesian Leader," Benar News, 2019, <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/coalition-concerns-10182019163910.html>.

⁵ Muhammad Choirul Anwar, "Jokowi: Alhamdulillah 1.500 Km Tol Baru Sudah Dibangun," CNBC Indonesia, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191106145312-4-113153/jokowi-alhamdulillah-1500-km-tol-baru-sudah-dibangun>.

⁶ Jihaan Khoirunnisaa, "Pemerintah Luncurkan Sistem INSW 2.0, Pacu Efisiensi Sistem Logistik RI," detikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6764372/pemerintah-luncurkan-sistem-insw-2-0-pacu-efisiensi-sistem-logistik-ri>.

menjadi 2,3 hari pada tahun 2019, menurut laporan dari World Bank. Penyederhanaan regulasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi biaya transaksi bagi pelaku usaha. Tidak hanya itu, pemerintahan Joko Widodo juga telah menandatangani berbagai *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara-negara mitra. Misalnya, perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang ditandatangani pada tahun 2020, diharapkan dapat membuka akses pasar baru bagi produk-produk Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Menurut Kementerian Perdagangan, implementasi RCEP diperkirakan meningkatkan ekspor Indonesia hingga 11% pada tahun 2025.

Sejalan dengan upaya perbaikan infrastruktur dan reformasi birokrasi di era pemerintahan Joko Widodo, strategi diversifikasi pasar ekspor menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan perdagangan internasional. Pasar ekspor tradisional merupakan kumpulan negara tujuan ekspor utama Indonesia yang sudah lama terjalin hubungan perdagangan dan memiliki volume ekspor besar. Contohnya, Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Faktor pendorong pasar tradisional terlihat dari stabilitas, terbangun sistem logistik, dan kerja sama jangka panjang.⁷ Pasar ekspor tradisional pun menggambarkan mengenai jumlah negara pesaing yang lebih banyak. Melalui definisi, pasar ekspor tradisional dilanjutkan kegunaannya melalui kata pasar tradisional. Disarankan oleh pentingnya mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional seperti Tiongkok, Jepang, dan AS, Indonesia secara aktif mencari peluang baru di pasar-

⁷ Ichsan Emerald Alamsyah, "Zulhas: RI Akan Kejar Pasar Nontradisional Untuk Perluas Ekspor," REPUBLIK, 2022, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rjztjy349/zulhas-ri-akan-kejar-pasar-nontradisional-untuk-perluas-ekspor>.

pasar ekspor nontradisional, termasuk di benua Afrika. Pasar ekspor nontradisional merupakan negara tujuan ekspor yang masih baru, tapi punya potensi pertumbuhan ekspor yang tinggi. Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, Turki, Brasil termasuk dalam pasar ini. Perkembangan terhadap pasar ini biasanya masih berkembang, dan seringkali kali belum ada perjanjian perdagangan langsung. Tantangan terkait logistik dan regulasi masih harus diupayakan negara.⁸ Oleh karena itu, istilah pasar tradisional digunakan dalam kelanjutan penulisan ini dalam memahami pasar ekspor nontradisional. Afrika Selatan menjadi salah satu negara target utama dalam strategi diversifikasi ini. Sebagai ekonomi terbesar di Afrika dengan PDB sebesar 283 miliar dolar AS pada tahun 2020,⁹ Afrika Selatan menawarkan peluang besar sebagai pasar bagi produk-produk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2019, total nilai perdagangan bilateral mencapai 1,3 miliar dolar AS, meningkat dari 1,1 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya.¹⁰ Ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan meliputi kendaraan bermotor, karet alam, dan minyak kelapa sawit, sementara impor dari Afrika Selatan didominasi oleh produk-produk pertanian dan bahan kimia.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan secara resmi dimulai pada tahun 1994. Pada tanggal 17 Januari 1994, Presiden Soeharto

⁸ Ichsan Emerald Alamsyah, "Zulhas: RI Akan Kejar Pasar Nontradisional Untuk Perluas Ekspor," REPUBLIK, 2022, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rjztjy349/zulhas-ri-akan-kejar-pasar-nontradisional-untuk-perluas-ekspor>.

⁹ Clive Ndou, "SA Now Has Africa's Largest Economy," The Witness, 2024, <https://witness.co.za/news/2024/04/23/sa-now-has-africas-largest-economy/>.

¹⁰ Setkab RI, "Peningkatan Hubungan Indonesia Dengan Negara-Negara Afrika Pascakunjungan Kenegaraan Presiden RI," 2023, <https://setkab.go.id/peningkatan-hubungan-indonesia-dengan-negara-negara-afrika-pascakunjungan-kenegaraan-presiden-ri/>.

menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 1994, yang menetapkan pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan. Keputusan ini diambil setelah berakhirnya sistem apartheid dan pencabutan sanksi ekonomi oleh PBB terhadap Afrika Selatan, sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dan ekonomi dengan negara tersebut.¹¹ Selanjutnya, untuk memperkuat hubungan perdagangan, pada tanggal 20 November 1997, Indonesia dan Afrika Selatan menandatangani Persetujuan Perdagangan Bilateral di Cape Town. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1998 kemudian mengesahkan perjanjian tersebut, yang mencakup pembentukan Joint Trade Committee (JTC) sebagai mekanisme untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi kedua negara.

Guna memperkuat hubungan perdagangan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan pameran dagang, misi dagang, dan perjanjian kerja sama ekonomi. Salah satu melalui JTC antara Indonesia dan Afrika Selatan yang dimulai pada tahun 2005. Kedua negara menandatangani Komunike Bersama mengenai pendirian JTC dalam acara rapat antara delegasi Indonesia dan Afrika Selatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika di Jakarta. Sejak pembentukannya, JTC telah mengadakan tiga kali pertemuan. Selain itu, perjanjian *Preferential Trade Agreement* (PTA) yang sedang dalam tahap negosiasi diharapkan dapat lebih memfasilitasi arus perdagangan antara kedua negara dengan menurunkan tarif bea masuk dan menyederhanakan

¹¹ BPK RI, “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1994 Tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Pretoria, Afrika Selatan Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Cape Town, Afrika Selatan” (Jakarta, 1994), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60711/keppres-no-53-tahun-1994>.

prosedur perdagangan. Upaya Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke Afrika Selatan juga didukung oleh peningkatan hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang. Dalam kunjungan kenegaraan pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo dan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdagangan dan investasi di antara kedua negara.

Melihat berbagai inisiatif dan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan internasional, penting untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya dalam konteks perdagangan dengan Afrika Selatan. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki judul **“Analisis Perdagangan Internasional Indonesia ke Afrika Selatan di Era Pemerintahan Joko Widodo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks perdagangan internasional yang terus berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru, terutama dalam upaya memperluas pasar ekspornya ke pasar nontradisional seperti Afrika Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat bahwa ada upaya signifikan dari pemerintah Indonesia, khususnya di era pemerintahan Joko Widodo, untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan Afrika Selatan. Namun, meskipun terdapat peningkatan volume perdagangan, masih banyak aspek yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami dinamika dan prospek kerja sama ini

secara menyeluruh. Identifikasi masalah ini penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi yang diterapkan dapat memengaruhi perkembangan perdagangan bilateral serta menentukan langkah-langkah yang lebih efektif di masa depan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan kunci, yaitu:

1. Apa saja bentuk aktivitas perdagangan internasional Indonesia dan Afrika Selatan di era pemerintahan Joko Widodo?
2. Bagaimana dinamika aktivitas perdagangan internasional Indonesia dan Afrika Selatan di era pemerintahan Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Afrika Selatan selama era pemerintahan Joko Widodo. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk utama dari aktivitas perdagangan internasional yang terjalin antara kedua negara, seperti ekspor, impor, serta sektor-sektor industri yang berperan penting dalam hubungan bilateral tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika perdagangan yang terjadi, mencakup perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada aktivitas perdagangan, fluktuasi nilai perdagangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kedua negara dalam memanfaatkan hubungan dagang ini.

Dengan menjawab pertanyaan mengenai bentuk dan dinamika aktivitas perdagangan internasional, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana Indonesia dan Afrika Selatan bekerja sama dalam perdagangan global di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan kontribusi strategis perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara, serta memperjelas peran yang dimainkan oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar global, kebijakan perdagangan regional, dan perkembangan geopolitik dalam memengaruhi dinamika hubungan perdagangan ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk, pertama, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perdagangan internasional. Dengan menganalisis data perdagangan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kita dapat mengevaluasi sejauh mana upaya seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi berhasil meningkatkan volume dan nilai perdagangan. Sebagai contoh, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan dari 640 juta dolar AS pada tahun 2014 menjadi 970 juta dolar AS pada tahun 2020, yang mencerminkan dampak positif dari kebijakan pemerintah.

Kedua, analisis terhadap hubungan perdagangan dengan Afrika Selatan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha Indonesia. Meskipun ada peningkatan volume perdagangan, masih terdapat

berbagai hambatan yang perlu diatasi. Misalnya, pelaku usaha sering kali menghadapi tantangan dalam hal perbedaan standar kualitas dan regulasi teknis antara kedua negara. Dengan penelitian yang mendalam, hambatan-hambatan ini dapat diidentifikasi dan solusi yang tepat dapat dirumuskan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Afrika Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi Indonesia melalui perdagangan internasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Analisis yang mendalam dan berbasis data membantu semua pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan global.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan dalam memahami alur dan substansi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai fokus penelitian serta alasan pentingnya penelitian dilakukan.

Bab II: Kerangka Berpikir

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang relevan, termasuk studi-studi terdahulu terkait perdagangan internasional antara Indonesia dan Afrika Selatan, serta teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis. Teori utama yang digunakan adalah Neoliberalisme, disertai dengan konsep perdagangan internasional, diplomasi ekonomi, dan kerja sama internasional.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan komparatif untuk mengkaji dinamika perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan di era pemerintahan Joko Widodo.

Bab IV: Analisis

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang membahas secara mendalam hasil analisis terkait bentuk aktivitas perdagangan internasional antara Indonesia dan Afrika Selatan, regulasi dan kebijakan yang berlaku, serta dinamika perdagangan di era pemerintahan Joko Widodo, baik pada periode pertama maupun periode kedua masa kepemimpinannya.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan peneliti berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan merangkum jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait agar dapat meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan.